

# LAPORAN

## INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

### 2024



TRIWULAN III  
Tahun 2024

# LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Balai Diklat Keagamaan Surabaya

Disahkan Tanggal: 11 Oktober 2024

Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya



Dr. H. Japar M. Pd

wp. 196812311994031026

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, dan atas karunia, hidayah serta inayah-Nya, Laporan Hasil **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya** dapat terselesaikan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran persepsi peserta pelatihan terkait korupsi selama berlangsungnya kegiatan pelatihan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perbaikan kualitas kinerja di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

Panitia **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya** mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sejak pelaksanaan survei hingga penyusunan laporan ini. Segala saran dan masukan sangat diperlukan karena kami menyadari adanya kekurang-sempurnaan dalam laporan ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Hasil **Survei Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya**.

Surabaya, Oktober 2024

Tim Pelaksana

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1. LATAR BELAKANG .....	6
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN .....	7
1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI .....	7
BAB II METODE PENGUKURAN .....	8
2.1. POPULASI DAN SAMPEL .....	8
2.2. WAKTU DAN TEMPAT .....	8
2.3. RESPONDEN .....	8
2.4. KUESIONER .....	8
2.5. NILAI PERSEPSI .....	9
BAB III HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI .....	10
3.1. PROFIL RESPONDEN .....	10
3.2. HASIL PERHITUNGAN IPA K .....	13
3.3. REKAPITULASI NILAI .....	21
BAB IV PENUTUP .....	24
4.1. KESIMPULAN .....	24
4.2. REKOMENDASI .....	24
LAMPIRAN .....	25

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Karakteristik Gender Responden .....	11
Gambar 3.2. Karakteristik Kelompok Umur Responden .....	12
Gambar 3.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden .....	12
Gambar 3.4. Karakteristik Pangkat/Golongan Responden .....	13
Gambar 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan .....	14
Gambar 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan .....	15
Gambar 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh .....	15
Gambar 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah .....	16
Gambar 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya .....	17
Gambar 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan .....	18
Gambar 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang .....	19
Gambar 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia .....	19
Gambar 3.13. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan .....	20
Gambar 3.14. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan .....	21
Gambar 3.15. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan .....	22
Gambar 3.16. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian .....	23

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Nilai Persepsi ..... 9

Tabel 3.1. Pelatihan oleh BDK Surabaya Juli – September 2024 ..... 10

Tabel 3.2. Tingkat Partisipasi Survei ..... 11

Tabel 3.3. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan ..... 14

Tabel 3.4. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan ..... 14

Tabel 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh ..... 15

Tabel 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah ..... 16

Tabel 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya ..... 17

Tabel 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan ..... 18

Tabel 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang ..... 18

Tabel 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia ..... 19

Tabel 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan ..... 20

Tabel 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan ..... 20

Tabel 3.13. Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya ..... 21

Tabel 3.14. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan ..... 22

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai Diklat Keagamaan Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah tersusunnya indeks persepsi anti korupsi yang sekaligus menjadi parameter Pemerintah yang Bersih dan Melayani.

Balai Diklat Keagamaan Surabaya merupakan lembaga pemerintah yang menjadi UPT Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan diklat di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 59 tahun 2015, tugas Balai Diklat Keagamaan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga administrasi serta tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Diklat yang diselenggarakan terdiri dari diklat sebelum pegawai menduduki jabatan (pelatihan dasar/latsar), diklat dalam jabatan dan diklat kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Keagamaan Surabaya senantiasa terkait dengan aktivitas pelayanan kepada peserta diklat. Diharapkan pelayanan yang diberikan adalah pelayanan publik yang bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

Demi terwujudnya pelayanan kediklatan yang bebas dari korupsi, dilakukan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Persepsi yang baik dari peserta diklat akan ditunjukkan dari tingginya perolehan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Sedangkan IPAK yang rendah menunjukkan kurang pedulinya lembaga terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Perolehan IPAK tersebut selanjutnya bisa dijadikan dasar dalam penerapan kebijakan terkait pelayanan yang bebas dari korupsi.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Secara umum maksud dan tujuan dilaksanakannya Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Di samping itu, juga bertujuan untuk mendapatkan referensi yang valid dalam menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara kontinyu serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi diharapkan dapat menjadi rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. RUANG LINGKUP DAN BATASAN**

Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi di Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilakukan dalam kurun waktu Bulan Juli hingga September Tahun 2024 dengan melibatkan peserta yang mengikuti pelatihan selama kurun waktu tersebut.

## **1.4. HASIL YANG INGIN DICAPAI**

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi mengenai Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan diklat di Balai Diklat Keagamaan Surabaya.

# BAB II

## METODE PENGUKURAN

### 2.1. POPULASI DAN SAMPEL

Dalam kegiatan ini, yang menjadi populasi adalah seluruh peserta Pelatihan BDK Surabaya baik itu dalam pola klasikal maupun campuran, yang diselenggarakan selama Bulan Juli hingga September Tahun 2024. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *voluntary response sampling* yaitu penentuan sampel yang terdiri dari *self-chosen respondent*. Dalam arti lain, para responden secara sukarela mengambil bagian dalam studi penelitian untuk berbagi pendapat mereka tentang topik yang sedang dibahas. Teknik ini dipilih atas pertimbangan kemudahan dan efisiensi waktu. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan metode pengumpulan data berupa survei secara *online* via *google form* dengan jenis data kuantitatif dan kualitatif.

### 2.2. WAKTU DAN TEMPAT

Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan sejak Juli hingga September 2024. Survei dilaksanakan secara *online* di tempat pelatihan masing-masing. Responden menjawab pertanyaan yang diajukan melalui *google form*. Kuesioner survei dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://bit.ly/spak2024>

### 2.3. RESPONDEN

Kriteria untuk responden Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III adalah peserta Pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya selama Bulan Juli hingga September 2024. Untuk menghindari bias, responden yang dipilih ialah mereka yang sedang melakukan atau yang telah melakukan pelatihan dalam waktu referensi survei berlangsung.

### 2.4. KUESIONER

Kuesioner dipilih sebagai alat bantu pengumpulan data guna menyusun Indeks Persepsi Anti Korupsi. Unsur yang dipakai untuk mengukur persepsi peserta pelatihan dalam survei ini sebanyak sepuluh unsur yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban berskala

ordinal, yaitu "selalu", "sering", "jarang", "tidak ada" dengan skor untuk masing-masing jawaban dari angka 1,2,3, dan 4. Kesepuluh unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Manipulasi peraturan;
- 2) Penyalahgunaan jabatan;
- 3) Menjual pengaruh;
- 4) Hadiah;
- 5) Transparansi Biaya;
- 6) Pencaloan;
- 7) Perbuatan curang;
- 8) Transaksi rahasia;
- 9) Transparansi Aduan
- 10) Respon terhadap pengaduan.

## 2.5. NILAI PERSEPSI

Penilaian persepsi sangat penting dalam mengukur hasil pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi. Dalam membaca interval hingga penilaian kinerja pelayanan, tabel nilai persepsi dapat memandu masyarakat dalam menyimpulkan kinerja pelayanan suatu institusi. Sehingga baik institusi maupun masyarakat nantinya dapat memberikan sumbangsih saran, pendapat hingga kritikan yang membangun. Berikut adalah nilai persepsi, nilai interval, nilai konversi, mutu, dan kinerja pelayanan.

Tabel 2.1. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Layanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

## BAB III

# HASIL PENGUKURAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

### 3.1. PROFIL RESPONDEN

Sepanjang Triwulan III Tahun 2024, BDK Surabaya setidaknya telah melaksanakan 12 Pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan dalam pola tatap muka dan dalam jaringan melalui skema Pelatihan di Wilayah Kerja pola campuran. Berikut ditabulasikan pelatihan yang diselenggarakan selama Bulan Juli hingga September 2024 beserta jenis dan pola pelatihannya.

Tabel 3.1. Pelatihan oleh BDK Surabaya Juli – September 2024

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Pelatihan	Pola Pelatihan
1	Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	8 – 27 Juli 2024	Pelatihan Administrasi	Reguler Blended
2	Pelatihan TIK MTs Kab. Sidoarjo	3 – 12 Juli 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
3	Pelatihan TIK MTs Kab. Banyuwangi	3 – 12 Juli 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
4	Pelatihan Metodologi Pembelajaran Kab. Bojonegoro	3 – 12 Juli 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
5	Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka Kab. Ponorogo	3 – 12 Juli 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
6	Pelatihan Implementasi Kurikulum Merdeka RA Kab. Pacitan	3 – 12 Juli 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
7	Pelatihan Manajemen Madin Kota Probolinggo	8 – 20 Juli 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
8	Pelatihan TIK MTs Kab. Sampang	8 – 20 Juli 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK Blended
9	Pelatihan Teknis Manajemen Penyelenggaraan Pontren Kab. Banyuwangi	8 – 20 Juli 2024	Pelatihan Administrasi	PDWK Blended
10	Pelatihan PPMB Kab. Kediri	16 – 20 Juli 2024	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK
11	Pelatihan PPMB Kab. Tulungagung	16 – 20 Juli 2024	Pelatihan Teknis Pendidikan	PDWK
12	Pelatihan PPMB Kota Surabaya	12 – 16 Agustus 2024	Pelatihan Teknis Keagamaan	PDWK

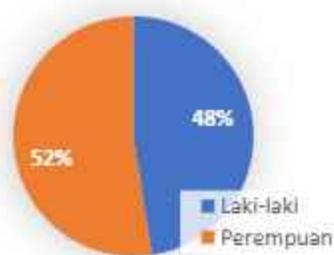
Selama periode survei triwulan III, sebanyak **122 responden** telah berpartisipasi dalam Survei Persepsi Anti Korupsi yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Dalam triwulan

ketiga Tahun 2024, tingkat partisipasi survei untuk peserta Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan adalah sebanyak **69 responden**. Tingkat partisipasi survei untuk Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan sebanyak **47 responden** sedangkan tingkat partisipasi survei untuk peserta Pelatihan Tenaga Administrasi adalah sebanyak **5 responden**. Responden tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori responden untuk diketahui karakteristiknya.

Tabel 3.2. Tingkat Partisipasi Survei

Jenis Pelatihan	Jumlah Responden Terlibat
Pelatihan Teknis Pendidikan	69
Pelatihan Teknis Keagamaan	47
Pelatihan Administrasi	5

Partisipasi peserta dalam pelatihan yang diadakan oleh BDK Surabaya selama Triwulan III tahun 2024 didominasi oleh peserta perempuan dengan porsi 52 persen. Dari gambar 3.1 ditunjukkan bahwa dari total 122 responden, sebanyak 64 orang adalah perempuan sedangkan sisanya adalah laki-laki. Jika diperhatikan per rumpun pelatihan, tampak variasi dalam karakteristik gender responden. Peserta Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan didominasi oleh perempuan yakni sebanyak 62 persen dari 69 responden. Sebaliknya, laki-laki lebih mendominasi Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Tenaga Administrasi yakni masing-masing sebesar 58 persen dan 80 persen dari sejumlah responden pada rumpun pelatihan tersebut.



Gambar 3.1. Karakteristik Gender Responden

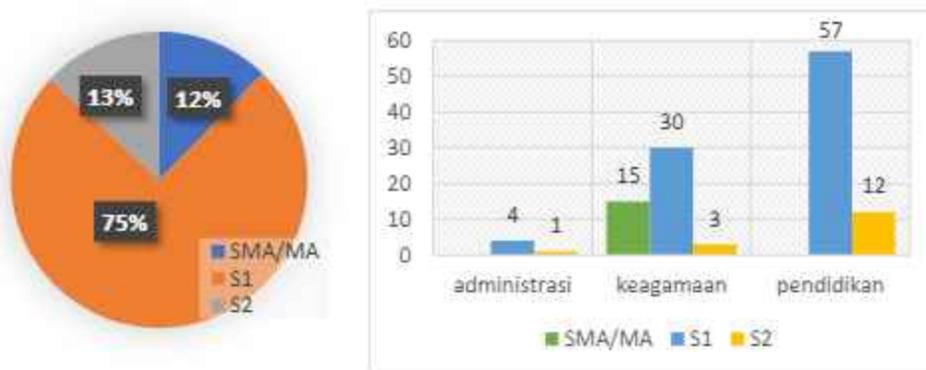
Dari gambar 3.2 diketahui bahwa sebaran usia responden pada survei kali ini tampak beragam. Sebanyak 38 orang merupakan responden dari kelompok umur 40-49 tahun, kemudian 37 orang berusia antara 30-39 tahun. Lalu sebanyak 35 orang adalah responden dalam kelompok usia lebih dari 49 tahun, sedangkan sisanya sebanyak 12 orang merupakan kelompok muda berusia di bawah 30 tahun.

Responden yang mewakili pelatihan tenaga administrasi hanya berasal dari kelompok usia 30-39 tahun dan 40-49 tahun dengan proporsi 40 berbanding 60. Responden pada pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan tampak lebih berimbang seperti yang ditunjukkan oleh gambar 3.2.



Gambar 3.2. Karakteristik Kelompok Umur Responden

Pada pelatihan tenaga teknis pendidikan, sebanyak 14 persen responden berasal dari kelompok usia kurang 30 tahun. Sisanya tersebar dalam kelompok usia lainnya dalam kisaran 28 hingga 29 persen. Begitu pula dengan responden pelatihan tenaga teknis keagamaan, hanya sekitar 4 persen responden berasal dari kelompok usia muda kurang dari 30 tahun. Responden lainnya tersebar dalam kelompok usia 30-39 tahun, 40-49 tahun, dan di atas 49 tahun dengan rentang 31 hingga 33 persen.



Gambar 3.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

Dari keseluruhan peserta pelatihan BDK Surabaya selama triwulan ketiga tahun 2024, sebanyak 75 persen dari populasi merupakan tamatan sarjana, disusul oleh para magister sebanyak 13 persen. Sisanya merupakan lulusan SMA/MA sebanyak 12 persen. Para sarjana mendominasi ketiga rumpun pelatihan yakni 4 orang di pelatihan tenaga administrasi, 30 orang di pelatihan teknis keagamaan, dan 57 orang di pelatihan tenaga teknis pendidikan. Responden dengan pendidikan terakhir SMA/MA hanya tersebar di rumpun pelatihan teknis keagamaan.



Gambar 3.4. Karakteristik Pangkat/Golongan Responden

Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya bukan hanya diperuntukan bagi PNS melainkan juga untuk Non ASN dan PPPK. Dalam kurun waktu Juli hingga September 2024, peserta Non ASN dan PPPK telah berpartisipasi dalam beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Berdasarkan gambar 3.4 tampak adanya perbedaan karakteristik di setiap rumpun pelatihan. Pelatihan tenaga administrasi didominasi oleh PNS dalam proporsi 60 persen. Berbanding terbalik dengan pelatihan tenaga teknis keagamaan yang pesertanya mayoritas merupakan Non ASN sebanyak 63 persen. Begitu pula dengan pelatihan tenaga teknis pendidikan yang didominasi oleh Non ASN sebanyak 48 persen.

### 3.2. HASIL PERHITUNGAN IPAK

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat sepuluh unsur yang dinilai dalam survei Persepsi Anti Korupsi. Berikut ini akan diuraikan hasil perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk masing-masing unsur.

#### 3.2.1. Penilaian Setiap Unsur

##### a. Manipulasi Peraturan

Dari total responden sebanyak 122 responden, 120 orang di antaranya setuju bahwa tidak ada manipulasi peraturan di BDK Surabaya, dan sisanya sebanyak 2 orang menyatakan jarang menemui peristiwa manipulasi peraturan di BDK Surabaya. Dari skala 1-4, persepsi publik terhadap indikator manipulasi peraturan mendapatkan indeks sebesar **3,98**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari manipulasi peraturan**.

Tabel 3.3. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	2	1,64%
Tidak Ada	4	120	98,36%
Jumlah		122	100%



Gambar 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Manipulasi Peraturan

**b. Penyalahgunaan Jabatan**

Dari skala 1-4, persepsi mengenai penyalahgunaan jabatan berhasil mencapai indeks **3,98**. Indeks ini diperoleh berkat sebanyak 121 responden menyatakan bahwa tidak ada penyalahgunaan jabatan di lingkungan BDK Surabaya. Sisanya menyatakan selalu melihat ada penyalahgunaan jabatan, yakni sebanyak 0,82 persen. Dari perolehan indeks tersebut, BDK Surabaya dinyatakan **bersih dari penyalahgunaan jabatan**.

Tabel 3.4. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	1	0,82%
Sering	2	0	0%
Jarang	3	0	0,00%
Tidak Ada	4	121	99,18%
Jumlah		122	100,0%



Gambar 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Penyalahgunaan Jabatan

### c. Menjual Pengaruh

Dari total 122 responden, 118 orang diantaranya menyatakan tidak pernah dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya untuk membantu pengurusan berkas tertentu. Sisanya, masing-masing sebanyak 2 orang menyatakan bahwa mereka jarang dan sering melihat praktik menjual pengaruh di BDK Surabaya. Dari pengumpulan data tersebut, didapatkan nilai persepsi sebesar 3,95 sehingga dapat disimpulkan bahwa BDK Surabaya **bersih dari tindakan menjual pengaruh**.

Tabel 3.5. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	2	1,64%
Jarang	3	2	1,64%
Tidak Ada	4	118	96,72%
Jumlah		122	100,0%



Gambar 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Menjual Pengaruh

#### d. Hadiah

Persepsi untuk unsur ini diukur melalui pertanyaan, "Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta?" sebanyak 82,79 persen dari responden menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tersebut, 10 orang atau sekitar 8,20 persen menyatakan jarang, 2,46 persen menyatakan sering, dan sisanya sebanyak 8 orang atau sekitar 6,56 persen dari total responden menyatakan bahwa mereka selalu memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima meskipun tidak pernah diminta. Dari pengumpulan data ini, diperoleh indeks persepsi sebesar **3,67**. Angka ini dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari gratifikasi** atau penerimaan hadiah.

Tabel 3.6. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	8	6,56%
Sering	2	3	2,46%
Jarang	3	10	8,20%
Tidak Ada	4	101	82,79%
Jumlah		122	100,0%



Gambar 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Hadiah

#### e. Transparansi Biaya

Biaya/tarif pelayanan yang dibebankan kepada peserta dalam rangka mengikuti Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) maupun Pelatihan Reguler dalam Kampus BDK Surabaya adalah 0 (nol) rupiah atau gratis. Di samping sertifikat, peserta juga berhak mendapatkan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Honorarium ini diserahkan setelah pelatihan berakhir dan dibuktikan melalui SPJ dan kitir yang diserahkan kepada masing-masing peserta. Melalui kitir inilah rincian honorarium peserta dapat dilihat. Dalam rangka mengukur persepsi publik mengenai transparansi biaya di BDK

Surabaya, tim survei mengajukan pertanyaan berupa, “Apakah BDK Surabaya tidak memberikan bukti transaksi keuangan setelah proses layanan pelatihan dilakukan?”

Tabel 3.7. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	13	10,66%
Sering	2	2	1,64%
Jarang	3	5	4,10%
Tidak Ada	4	102	83,61%
Jumlah		122	100,0%



Gambar 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Biaya

Dari total 122 responden, sebanyak 102 orang diantaranya menyatakan bahwa tidak ada pelaksana kegiatan yang terlupa memberikan bukti transaksi. Sebanyak 5 orang menyatakan jarang, 2 orang menyatakan sering, dan ada 13 orang yang menyatakan bahwa pelaksana kegiatan selalu tidak memberikan bukti transaksi keuangan setelah proses pelayanan pelatihan. Berdasarkan data tersebut, didapatkan indeks persepsi publik sebesar 3,61. Angka tersebut menunjukkan bahwa publik percaya BDK Surabaya bersih dalam hal transparansi biaya.

**f. Pencaloan**

Dari skala 1-4 unsur pencaloan memperoleh indeks persepsi sebesar 3,98. Hal ini berarti para responden menganggap bahwa layanan pelatihan yang diberikan oleh BDK Surabaya **bersih dari unsur pencaloan**. Jika diuraikan per skor, sebanyak 362 orang atau 99,14 persen dari total responden mengatakan bahwa tidak ada praktik pencaloan di BDK Surabaya. Sisanya masing-masing sebanyak 1 orang menyatakan bahwa mereka jarang, sering, dan selalu mengetahui adanya praktik pencaloan di BDK Surabaya.

Tabel 3.8. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	1	0,82%
Tidak Ada	4	121	99,18%
Jumlah		122	100,0%



Gambar 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Pencaloan

**g. Perbuatan Curang**

Dari total responden sebanyak 122 responden, 117 orang di antaranya menyatakan bahwa tidak ada praktik KKN di BDK Surabaya. Sisanya sebanyak 5 orang atau sekitar 4,10 persen menyatakan jarang melihat/mendengar adanya praktik KKN di BDK Surabaya. Dari skala 1-4, persepsi publik terhadap unsur perbuatan curang adalah sebesar **3,96**. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa BDK Surabaya **bersih dari praktik KKN** (perbuatan curang).

Tabel 3.9. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	5	4,10%
Tidak Ada	4	117	95,90%
Jumlah		122	100,0%



Gambar 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Perbuatan Curang

#### h. Transaksi Rahasia

Pada triwulan ketiga tahun 2024, unsur transaksi rahasia memperoleh indeks persepsi sebesar **3,99**. Terdapat 121 orang yang percaya bahwa tidak ada transaksi rahasia di BDK Surabaya, sisanya dengan proporsi 0,82 persen menganggap jarang ada praktik transaksi rahasia. Berdasarkan perolehan tersebut, dapat dikatakan bahwa publik menganggap BDK Surabaya **bersih dari transaksi rahasia**.

Tabel 3.10. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	0	0,00%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	1	0,82%
Tidak Ada	4	121	99,18%
Jumlah		122	100,0%



Gambar 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transaksi Rahasia

#### i. Transparansi Aduan

Sebanyak 122 responden atau sekitar 91,80 persen dari total responden mengatakan bahwa BDK Surabaya terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi.

Dari skala 1-4, indeks persepsi yang diperoleh untuk unsur transparansi aduan adalah sebesar 3,77. Berdasarkan perolehan indeks persepsi ini, BDK Surabaya dapat dikatakan **bersih dalam hal transparansi aduan.**

Tabel 3.11. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	9	7,38%
Sering	2	0	0,00%
Jarang	3	1	0,82%
Tidak Ada	4	112	91,80%
Jumlah		122	100,0%



Gambar 3.13. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Transparansi Aduan

#### j. Respon Terhadap Aduan

Selama survei berlangsung, responden disuguhkan pertanyaan berupa, “Apakah BDK Surabaya merespon lambat pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi?”. Terdapat 117 responden atau sekitar 95,90 persen yang menyatakan tidak ada respon lambat terhadap aduan terkait korupsi. Sebanyak 3 orang, atau sekitar 2,46 persen dari total responden mengatakan bahwa respon lambat terhadap aduan jarang terjadi di BDK Surabaya. Sebanyak 2 orang atau sekitar 1,64 persen menyatakan bahwa BDK Surabaya selalu merespon lambat aduan/laporan masyarakat terkait korupsi. Melalui pengumpulan data tersebut dapat diketahui bahwa persepsi publik terhadap unsur respon terhadap aduan mencapai indeks 3,93 yang berarti bahwa BDK Surabaya **bersih dalam hal respon terhadap aduan.**

Tabel 3.12. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
Selalu	1	2	1,64%
Sering	2	0	0,00%

Jarang	3	3	2,46%
Tidak Ada	4	117	95,90%
Jumlah		122	100,0%



Gambar 3.14. Frekuensi Persepsi Anti Korupsi Unsur Respon Terhadap Aduan

### 3.3. REKAPITULASI NILAI

Dari uraian penilaian unsur di atas, selanjutnya dibuat perbandingan antar unsur. Berdasarkan tabel 3.13 tampak bahwa unsur transaksi rahasia dan pencaloan merupakan dua unsur yang mendapatkan nilai persepsi tertinggi. Masing-masing unsur tersebut memperoleh indeks persepsi rata-rata sebesar 3,99. Sedangkan unsur transparansi biaya merupakan unsur dengan nilai terendah daripada unsur yang lain. Tingkat persepsi masyarakat untuk unsur ini hanya mencapai 3,61. Meski begitu, kesepuluh unsur yang dinilai semuanya dinyatakan **bersih dari korupsi** berdasarkan persepsi publik.

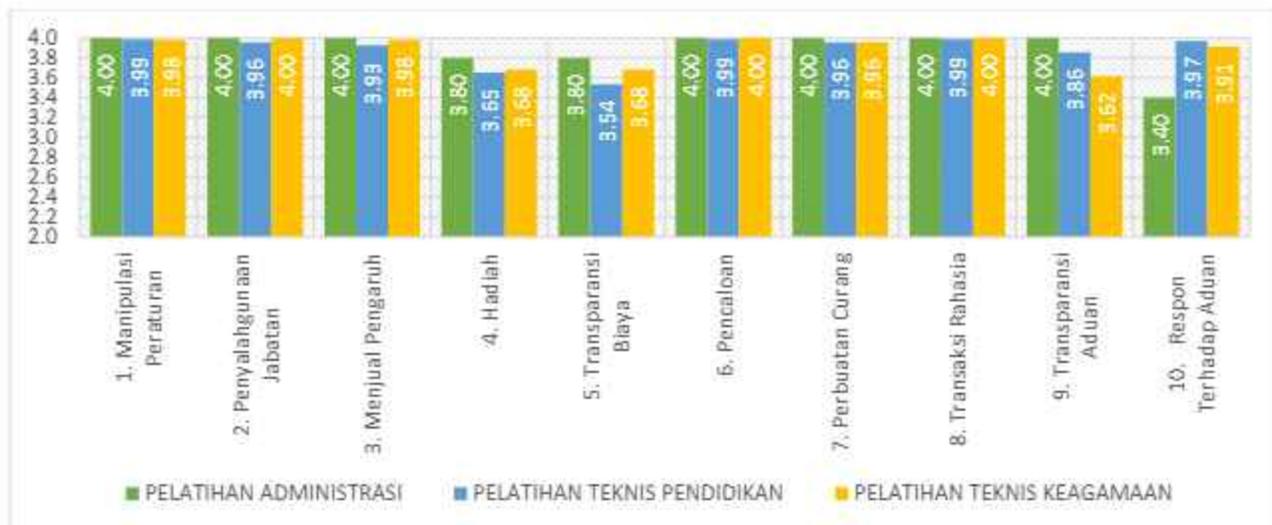
Tabel 3.13. Rekapitulasi Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya

UNSUR PENILAIAN	NILAI PERSEPSI	KINERJA UNIT PELAYANAN
MANIPULASI PERATURAN	3,98	Bersih dari korupsi
PENYALAHGUNAAN JABATAN	3,98	Bersih dari korupsi
MENJUAL PENGARUH	3,95	Bersih dari korupsi
HADIAH	3,67	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI BIAYA	3,61	Bersih dari korupsi
PENCALOAN	3,99	Bersih dari korupsi
PERBUATAN CURANG	3,96	Bersih dari korupsi
TRANSKSI RAHASIA	3,99	Bersih dari korupsi
TRANSPARANSI ADUAN	3,77	Bersih dari korupsi
RESPON TERHADAP ADUAN	3,93	Bersih dari korupsi
<b>NILAI IPAK</b>	<b>3,88</b>	<b>Bersih dari korupsi</b>

Tabel 3.14. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan

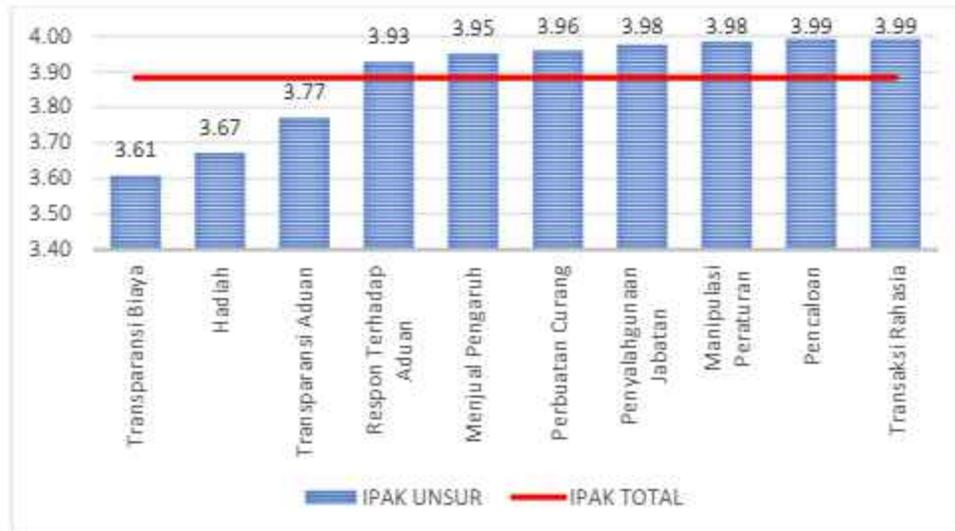
UNSUR PENILAIAN	IPAK		
	PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI	PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN	PELATIHAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN
1. Manipulasi Peraturan	4,00	3,99	3,98
2. Penyalahgunaan Jabatan	4,00	3,96	4,00
3. Menjual Pengaruh	4,00	3,93	3,98
4. Hadiah	3,80	3,65	3,68
5. Transparansi Biaya	3,80	3,54	3,68
6. Pencaloan	4,00	3,99	4,00
7. Perbuatan Curang	4,00	3,96	3,96
8. Transaksi Rahasia	4,00	3,99	4,00
9. Transparansi Aduan	4,00	3,86	3,62
10. Respon Terhadap Aduan	3,40	3,97	3,91
<b>NILAI IPAK</b>	<b>3,90</b>	<b>3,88</b>	<b>3,88</b>

Ketiga rumpun pelatihan mendapatkan predikat “bersih dari korupsi” dengan perolehan IPAK yang berselisih tipis. Pelatihan tenaga administrasi dengan perolehan IPAK tertinggi yakni sebesar 3,90. Selanjutnya pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan dengan nilai IPAK masing-masing sebesar 3,88. Indeks persepsi anti korupsi untuk masing-masing unsur dapat dilihat di tabel 3.14. Unsur-unsur penilaian dalam pelatihan tenaga administrasi mayoritas mendapatkan indeks persepsi sempurna sebesar 4,00. Pada pelatihan tenaga teknis pendidikan, unsur pencaloan dan transaksi rahasia merupakan dua unsur dengan indeks persepsi tertinggi dibanding unsur lainnya, yakni masing-masing sebesar 3,99. Sedangkan pada pelatihan tenaga teknis keagamaan, unsur penyalahgunaan jabatan, pencaloan, dan transaksi rahasia menjadi tiga unsur dengan indeks persepsi paling tinggi masing-masing dengan nilai sebesar 4,00.



Gambar 3.15. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Rumpun Pelatihan

Evaluasi terhadap hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan BDK Surabaya dapat dilakukan dengan mengurutkan dan membandingkan nilai IPAK terkecil untuk setiap unsur. Dari sepuluh unsur penyusun indeks persepsi anti korupsi, Balai Diklat Keagamaan Surabaya memiliki tiga unsur yang nilainya di bawah IPAK.



Gambar 3.16. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Unsur Penilaian

Unsur tersebut adalah transparansi biaya, hadiah, dan transparansi aduan. Ketiga unsur inilah yang seluruhnya memiliki nilai di bawah IPAK total. Unsur-unsur tersebut perlu mendapatkan prioritas perbaikan sebagai upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap BDK Surabaya yang bersih melayani.

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Gambaran dan analisis hasil capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi cerminan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya, sehingga rencana perbaikan yang akan dirumuskan benar-benar mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat pengguna pelayanan publik (peserta pelatihan).

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi Balai Diklat Keagamaan Surabaya pada triwulan ketiga tahun 2024 mencapai nilai **3,88** dari skala 4. Hal ini berarti bahwa masyarakat percaya layanan yang diberikan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari korupsi.
2. Kepercayaan masyarakat bahwa Balai Diklat Keagamaan Surabaya bersih dari transaksi rahasia mencapai 3,99 dari skala 4 dan merupakan nilai tertinggi dibandingkan unsur lainnya.
3. Unsur "transparansi biaya" merupakan unsur dengan nilai persepsi paling rendah dibandingkan unsur lainnya. Meski begitu, secara umum kinerja untuk unsur ini masuk dalam kategori "bersih dari korupsi".

### 4.2. REKOMENDASI

Beberapa hal yang mungkin dapat diperhatikan agar kepercayaan masyarakat meningkat terhadap layanan BDK Surabaya antara lain:

1. Panitia kegiatan memberikan penjelasan mengenai rincian honorarium peserta pada saat pengarahan program pelatihan serta memberikan cetak fisik rincian honorarium peserta sebagai upaya transparansi biaya.
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SP4N – LAPOR! dalam upaya penghimpunan aduan masyarakat terkait korupsi. Penghimpunan aduan kemudian dilaporkan pada masyarakat melalui infografis yang dipublikasikan di media sosial, beserta tindak lanjutnya.
3. Mengoptimalkan keberadaan lemari anti gratifikasi untuk menanggapi hadiah-hadiah yang diberikan oleh peserta pelatihan.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Kuesioner

The image shows two screenshots of a Google Docs document. The top screenshot displays the title page of a survey form. The bottom screenshot shows the beginning of the questionnaire, including fields for gender, age, and education level.

**Kementerian Agama RI  
Balai Diklat Keagamaan Surabaya**

### SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA TAHUN 2024

Sapak/ibu yang terhormat,  
Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2017-2025, dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keagamaan Surabaya berorientasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menjadi lembaga yang bersih dari korupsi.

Oleh karena itu, kami mengadakan survey secara online. Tujuan survey ini adalah untuk:

**Jenis Kelamin \***

- Laki-laki
- Perempuan

**Usia \***

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

**Pendidikan Terakhir \***

- SMA/MA
- D3
- S1
- S2
- S3

doc.google.com/forms/d/1FAyC3DhgFkqPUBsacZkAw7NGjJ1T3bC3Dg-B6ZPK3Bw/viewform

Photos (Online P... Google Sheet Tunc... Ceratj-Analis B...

Pangkat/Golongan \*

Pilih

No. ID \*

Jawaban Anda

Instansi \*

Cersah, Kerkenerag Kab. Tectan

Jawaban Anda

Unit Tugas \*

Jawaban Anda

doc.google.com/forms/d/1FAyC3DhgFkqPUBsacZkAw7NGjJ1T3bC3Dg-B6ZPK3Bw/viewform

Photos (Online P... Google Sheet Tunc... Ceratj-Analis B...

Pelatihan yang Dilakui pada Tahun 2024 \*

Pilih

Apakah pemberian layanan di BDK Surabaya disertai untuk maknawo tertentu? (Manipulasi Peraturan)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah layanan pada BDK Surabaya diberikan dengan permintaan imbalan tertentu oleh pelngas? (Penyebaburaman Jabatan)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Penelitian Anda dihubungi oleh pegawai BDK Surabaya yang akan membantu dalam pengurusan berkas tersebut? (Menjual Pengaruh)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah Anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima, meskipun tidak diminta? (Layanan)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah Anda menandatangani bukti transaksi berupa SPJ atas hal-hal yang diterima? (Transparansi)

1. Tidak Ada 2. Jarang 3. Sering 4. Selalu

Apakah Anda pernah mengetahui ada praktik pencucian dalam proses layanan di BDK Surabaya? (Pencucian)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah Anda pernah melihat dan/atau mendengar masalah terjadi praktik KKN di BDK Surabaya? (Perbuatan Curang)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

---

Apakah Anda pernah mengurus berkas tertentu melalui pegawai BDK Surabaya di luar kantor? (Transaksi Rahasia)

1. Selalu 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak Ada

docs.google.com/forms/d/1TAyQ35NgF8kP9jI6kxkKz79GyJ1T5ECHO-1foZKCI8w/viewfrom

Photos (Online P... Google Sheets, N... CAK 12-44833 N...

AI Bismillah

Apakah BDK Surabaya telah terbuka terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi? \*

1. Setuju 2. Seting 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Apakah BDK Surabaya merespon laporan pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi? \*

1. Setuju 2. Seting 3. Jarang 4. Tidak Ada

1 2 3 4

Kirim

Kembalikan formulir

Lampiran 2. Rekap Respon

